

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Kemiskinan identik dengan negara berkembang, contohnya Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami masalah kemiskinan yang cukup pelik, kemiskinan memang masalah yang krusial yang tidak bisa di selesaikan dengan waktu yang sebentar, ironisnya lagi bahwa pemerintah sebagai pengontrol kegiatan ekonomi memberikan perhatian utamanya lebih tercurah pada daerah-daerah perkotaan yang bisa dikatakan sektor-sektor industri nya masih terbilang cukup modern, sementara sektor pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana di pedesaan kurang memadai akibat dari dana yang tercurah pada sektor modern di perkotaan. Selain itu juga harga yang terus-menerus meningkat sedangkan standar kebutuhan yang tak ada habisnya semakin memperburuk situasi ekonomi, jumlah penduduk yang tiap tahun membeludak menyebabkan lahan pekerjaan semakin sedikit dan berimplikasi pada pengangguran. Hal inilah yang memunculkan ketimpangan dalam masyarakat, sehingga kemiskinan tidak dapat di katakan sebagai masalah yang sederhana. Sama halnya dengan pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan GNP semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan

dan penyediaan lapangan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (dikutip Ari Widiastuti dalam Todaro, 2000).

Persoalan kemiskinan masih menjadi masalah yang belum selesai sampai tuntas. Perbedaan kemiskinan pada masa lalu dan masa sekarang adalah situasinya dulu hampir semua penduduk Indonesia miskin atau dikenal sebagai *share poverty*, sedangkan sekarang kemiskinan terjadi di jaman modern dan ditengah-tengah sebagian masyarakat yang berlimpah (*affluent society*). Indikator kemiskinan lain diungkapkan oleh Profesor Sayoga. Garis kemiskinan untuk pedesaan ditetapkan setara dengan 240 kg beras per kapita per tahun. Sedangkan untuk daerah perkotaan setara dengan 360 kg beras per kapita per tahun.

Secara umum perkembangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan hingga tahun 1996 dan meningkat kembali tahun 1997 hingga 2000, baik ditinjau dari jumlah penduduk miskin ataupun relatif terhadap jumlah penduduk Indonesia. Kondisi yang berbeda adalah tahun 2000 hingga 2003 dimana jumlah penduduk miskin secara absolut meningkat namun secara relatif mengalami penurunan.

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya karena masalah ketidakmampuan mengelola sumber daya alam secara optimal tetapi juga karena kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa serta merta menyelesaikan persoalan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin kemampuan mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Hal ini karena pertama, hal yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat langsung melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya pada umumnya rakyat miskin, kedua pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal yang berbeda di Indonesia. Orang yang menganggur belum tentu miskin. Secara umum kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dapat dilihat dampak positifnya melalui adanya penurunan tingkat kemiskinan nasional. Pola kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar, antara lain : (1) masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dari pada pemerataan (2) sentralisasi kebijakan dari pada desentralisasi kebijakan (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif (4) memposisikan masyarakat sebagai obyek dari pada sebagai subyek (5) cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada 'charity' dari pada 'productivity' (6) asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

Secara umum persentasi kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan, dapat di lihat pada Tabel 1 periode 2009 hingga 2013. Penurunan ini tidak lepas dari kerja keras pemerintah dalam program-program pro-rakyat. Namun hal ini belum bisa di katakana maksimal akn tetapi dapat memberikan efek positif bagi peningatan masyarakat dalam meningkatkan hak-hak dasar mereka. Berikut adalah presentase jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2009 hingga 2013.

Tabel 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2009 – 2016

Tahun	Persentase
2009	14,15
2010	13,33
2011	12,49
2012	11,66
2013	11,47
2014	10,96
2015	11,13
2016	10,70

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentasi penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2009 presentasi kemiskinan di Indonesia sebesar 14,15, mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 13,33, selanjutnya di tahun 2011 presentasi penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 12,49, kemudian di tahun 2012 presentasi penduduk miskin kembali mengalami penurunan sebesar 11,66, pada tahun 2013 presentasi penduduk miskin sebesar 11,47 dan berujung pada tahun 2016 prestasi penduduk miskin menurun sebesar 10,70.

Penjelasan tabel di atas dapat diketahui jumlah kemiskinan dari tahun 2009 hingga tahun 2010 dapat berkurang untuk tiap tahun sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang tadinya semakin banyak dapat dikurangi dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, membuat provinsi ini terus dilanda permasalahan kemiskinan. Dalam perbandingan rata-rata tingkat kemiskinan diseluruh provinsi di

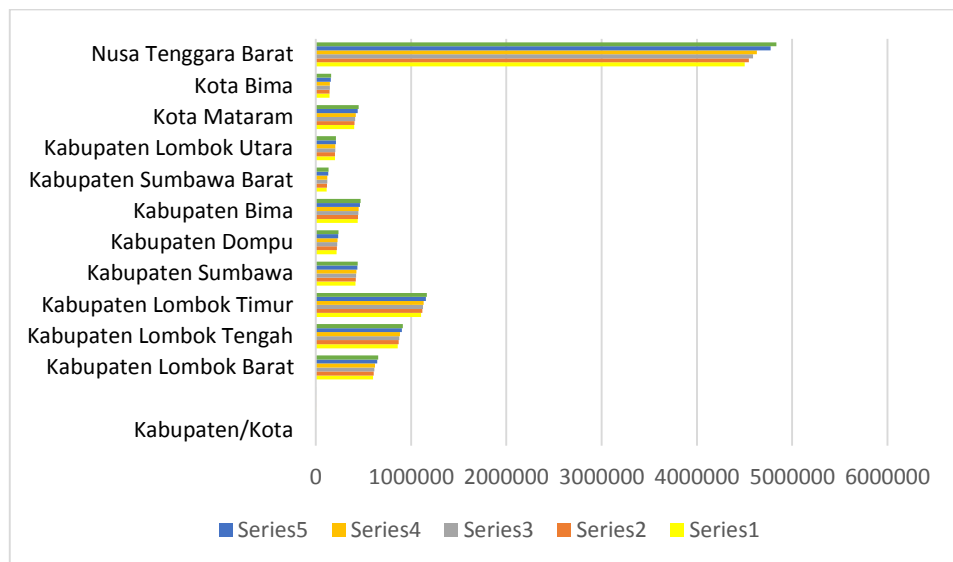
Indonesia tahun 2007-2011 memiliki rata-rata kemiskinan sebesar 23,73 %. Pada tahun 2013 presentasi penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat Mencapai 17,9% sedangkan kemiskinan di tingkat nasional sebesar 11,37%

Kondisi alam di provinsi NTB yang tidak jarang mengalami kekeringan, rawan pangan menjadi permasalahan warga NTB. Kemiskinan, gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan.

NTB memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar dan beragam, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah NTB. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya investasi yang dilakukan.

Masih tingginya kemiskinan menunjukkan bahwa penanganan yang serius dari pemerintah maupun stakeholder sangat diperlukan untuk meminimalisir angka kemiskinan. Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanganan kemiskinan, sehingga untuk menanggulangi kemiskinan perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan, khususnya NTB.

Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sumber daya hutan, lahan sawah, perkebunan daerah, pertambangan, kelautan, dan pariwisata, di Nusa Tenggara Barat belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum menjamin kesejahteraan bagi masyarakat wilayah Nusa Tenggara Barat. Kualitas kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada tingkat kemiskinan di wilayah itu sendiri. Tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat berada di atas rata-rata nasional. Kemiskinan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan pengangguran



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2015)

Secara umum dapat di lihat dalam tabel di bawah ini , sejak tahun 2010 nusa tenggara barat mengalami kemiskinan sebesar 1.009.352 atau 21,55% , pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 900.573 atau 19,73% , selanjutnya pada tahun 2012 juga mengalami penurunan sebesar 852.516 atau 18,6 % , kemudian pada 2013 mengalami penurunan kembali sebesar 843.664

atau 17,97%, pada tahun 2014 berakhir di angka 820.818 atau 17,24% dan terakhir pada tahun 2016 berujung di angka 804.442 atau 16.48%.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi NTB 2010-2016

Tahun	Jumlah dan persentase penduduk	
	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2010	1.009.352	21,55
2011	900.573	19.73
2012	852.516	18,63
2013	843.664	17,97
2014	820.818	17,24
2015	823.886	17.10
2016	804.442	16.48

*Bps, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat (2010-2016)

Perkembangan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat mencerminkan beratnya beban pemerintah dalam pengentasan kemiskinan penduduknya. Berdasarkan data yang didapat dari BPS , kabupaten yang memiliki jumlah miskin tertinggi di provinsi NTB yaitu kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 263,7 ribu jiwa.

Tingginya tingkat kemiskinan di kabupaten Lombok timur dikarenakan, secara topografis wilayah kabupaten lombo timur memiliki cuaca yang tidak menentu sehingga lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara baik, selain itu sektor pertanian (45 persen) masih memegang peranan penting kaena sebagian besar penduduk bekerja dan mengandalkan hidupnya dari pertanian (Amelia,2012).

Menurut daerah tempat tinggal jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan penduduk dipertanian umumnya bekerja di sektor sekunder maupun tersier sehingga memiliki pendapatan yang lebih banyak dibandingkan penduduk pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan informal (Amelia,2012)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi sebagai solusi untuk membuka wawasan berbagai pihak untuk mencari dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, PENDIDIKAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT”.

B. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, agar dalam penulisan skripsi ini tidak mengambang dan menyimpang dari tujuan penelitian sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan masalah tentang hal-hal yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu apakah terdapat pengaruh secara signifikan dari Variabel Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Variabel Tingkat Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)?
2. Bagaimana pengaruh Variabel pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)?
3. Bagaimana pengaruh Variabel jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
4. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
4. Menganalisis pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

- a) Sebagai salah satu tambahan teori yang telah ada berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b) Sebagai bahan untuk menambah wacana kepustakaan.
- c) Sebagai salah satu sumber untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

Berdasarkan penelitian ini di harapkan agar memberikan manfaat praktis antara lain:

- a) Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini di harapkan nantinya bisa memberikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi nusa tenggara barat.

Secara umum hasil penelitian ini di harapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan